

KEBIJAKAN REZIM OTORITER TERHADAP ISLAM POLITIK (STUDI KASUS REZIM SOEHARTO DAN ANWAR SADAT)

Mahmud Hamzawi Fahim Usman

Abstract

This dissertation titled "The Policies of Authoritarian Regimes towards Political Islam: A Case Study on Soeharto's and Anwar Sadat's Regimes" attempts to answer this question: what policies towards Political Islam were adopted by Soeharto's and Sadat's regimes and what are the similarities and differences between both of them as well as their underlying factors? This dissertation is a library research with qualitative data using descriptive, interpretative, and analytical approaches based on the theory of policy.

The policies of both regimes are classified into two broad strategies, namely: first, the subjugation of Political Islam's power (through two modes: a. violence and marginalization; and b. propaganda and image politics); second, the accommodation of Political Islam (through two modes: social and religious appeasement; and legislative policy appeasement). Those policies are significantly of similar style and aim but different in terms of order and tactic of implementation. In general, those policies are equally pragmatic and realistic for maximizing the regime's strength and gains and outrivaling all powers of Political Islam with view of achieving the state's political stability and avoiding the emergence of legitimacy crisis owing to domestic situations. Therefore, the researcher refers to such policies as hegemonic regime's domestic political stability strategy.

Keywords: Policies, Regime, Political Islam.

الملخص

حاولت هذه الرسالة العلمية بعنوان سياسات النظام الاستبدادي على الإسلام السياسي: دراسة واقع النظامين سوهارطو وأنور سادات في الإجابة عن سؤال: ما هي سياسات نظامي سوهارطو وأنور سادات تجاه الإسلام السياسي؟ وما هي الجوانب المشابهة والمغايرة بين النظامين، وما هي العوامل المؤدية إلى تلك الجوانب؟ رسالة الدكتوراه هذه عبارة عن البحث في المراجع مدعما بالمعلومات النوعية مع منهج التحليل الوصفي التأويلي المبني على نظرية سياسات الحكومة.

تصنف سياسات هذين النظامين إلى خطتين كبيرتين، هما خطة إخضاع قوة الإسلام السياسي وخطة التكيف معه. الخطة الأولى تشتمل على سياسات العنف والتهميش، وسياسات الدعاية، والانطباعات. والخطة الثانية تشتمل على الجوانب الاجتماعية والدينية، والجوانب السياسية والقانونية. هذه السياسات لها تشابه ملحوظ في الأشكال والأهداف، ولكنها مختلفة في الأولويات ومناهج التطبيق. بوجه عام كانت تلك السياسات ذات الطابع البراغماتي والواقعي لرفع قوة النظام ومصالحه، والغلبة على قوى الإسلام السياسي ومؤسسته، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والابتعاد عن حدوث الأزمة التشريعية داخل البلاد. ولهذا، يصوغ الباحث أنماط السياسات المعمولة بأنها تدبير الاستقرار السياسي داخل الدولة ذات النظام الاستبدادي.

الكلمات الدلالية: النظام، السياسات، الإسلام السياسي.

A. Pendahuluan

Sejarah modern Indonesia dan Mesir memperlihatkan bahwa pelbagai strategi kebijakan terhadap institusi Islam Politik telah dilaksanakan oleh rezim yang berkuasa di masing-masing negara. Masa pemerintahan presiden Soeharto yang dikenal dengan sebutan rezim Orde Baru di Indonesia (1968-1998) dan masa pemerintahan Anwar Sadat di Mesir (1970-1981) termasuk masa yang krusial dalam hal hubungan rezim yang berkuasa dengan institusi Islam Politik. Kedua presiden yang berkuasa dalam satu masa itu sama-sama memperlakukan kekuatan institusi Islam Politik dengan pelbagai strategi dan kebijakan demi memperoleh legitimasi yang diperlukan untuk stabilitas politik dan untuk menjamin hegemoni rezimnya.

Namun, ada satu hal yang unik, yaitu bahwa di Mesir pada masa rezim presiden Sadat tidak ada suatu kekuatan pun dari institusi Islam Politik yang secara resmi diakui oleh negara sebagai partai politik atau organisasi masyarakat formal yang memiliki sayap politik meskipun secara *de facto* kegiatan-kegiatannya tidak dibekukkan oleh negara. Hal ini beda dari keadaan kekuatan institusi Islam Politik di Indonesia pada masa rezim presiden Soeharto di mana negara telah mengakui sebagian kekuatan institusi Islam Politik sebagai partai politik seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti, yang kemudian digabungkan dalam PPP. Pertanyaan yang muncul akibat perbedaan itu adalah: apakah kebijakan-kebijakan rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam yang berlainan bentuk di negara masing-masing itu komparabel atau tidak komparabel? Apakah persamaan dan perbedaan dalam kebijakan-kebijakan kedua rezim terhadap kekuatan institusi Islam Politik merupakan suatu kebetulan atau merupakan fakta yang dapat diteliti berdasarkan kondisi dalam negeri dan rasionalitas pengambilan keputusan?

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Peneliti

memilih tema yang berjudul “Kebijakan Rezim Otoriter Terhadap Islam Politik: Studi Kasus Rezim Soeharto dan Anwar Sadat” untuk dijadikan bahan penelitian komparatif dalam disiplin ilmu politik dunia Islam modern. Menurut peneliti, apapun bentuk institusi Islam Politik, kekuatan potensialnya atau partisipasi politiknya sebagai pesaing politik tetap dikhawatirkan oleh rezim yang berkuasa karena akan dapat mempengaruhi sistem politik yang diterapkan oleh rezim penguasa. Oleh karena itu, penguasa rezim menghadapi semua dengan strategi dan taktik kebijakan yang hampir sama untuk melemahkan kekuatannya. Berdasarkan itulah peneliti melihat bahwa kebijakan rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik adalah komparabel meskipun di Mesir institusi Islam Politik belum pernah secara resmi diakui sebagai partai politik yaitu sejak pemerintahan Gamal Abdel Nasser yang melarang organisasi *Ikhwanul Muslimin* dan sayap politiknya. Penelitian ini lebih menitikberatkan analisis kebijakan politik rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik daripada analisis reaksi atau perilaku politik institusi Islam Politik di Indonesia dan Mesir terhadap kebijakan kedua rezim tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Kebijakan apa yang diambil oleh rezim Soeharto dan Anwar Sadat dalam menghadapi kekuatan institusi Islam Politik di negaranya masing-masing?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara kebijakan-kebijakan kedua rezim tersebut, dan faktor-faktor apakah yang ada di balik persamaan dan perbedaan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengklasifikasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik berdasarkan strategi dan

modusnya, dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta dampaknya terhadap kekuatan institusi Islam Politik.

2. Mencari titik-titik persamaan dan perbedaan antara kebijakan-kebijakan kedua rezim itu dalam hal strategi serta urutan intensitas masing-masing strategi guna mengetahui apakah kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi oleh formal-tidaknya institusi Islam Politik yang merupakan pesaing rezim.

D. Kegunaan Penelitian/ Significance of Research

1. Manfaat Ontologis: memberikan deskripsi baru tentang hubungan antara rezim yang berkuasa di Indonesia dan Mesir dengan institusi Islam Politik pada era Soeharto dan era Anwar Sadat dengan menjelaskan strategi kebijakan rezim yang berkuasa, tujuan, dan dampaknya.
2. Manfaat Epistemologis: memberi sudut pandang baru tentang persamaan dan perbedaan kebijakan rezim yang berkuasa di negara pluralis mayoritas Muslim terhadap institusi Islam Politik berdasarkan konteks dalam negeri dan rasionalitas pengambilan keputusan; memperkaya khazanah ilmu politik terutama ilmu politik Islam komparatif dan psikologi politik dalam hal relasi negara dengan institusi Islam Politik di negara pluralis mayoritas muslim.
3. Manfaat Aksiologis: menjadi rujukan sejarah politik yang berguna bagi para pengamat, peneliti, mahasiswa dan sejarawan politik dunia Islam tentang interpretasi urutan intensitas strategi kebijakan rezim yang berkuasa terhadap institusi Islam Politik di Indonesia dan Mesir;

menjadi bahan refleksi sejarah politik bagi aktivis Islam Politik serta para penguasa di negara-negara mayoritas Muslim agar menghindari kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi dalam interaksi rezim yang berkuasa dengan institusi Islam Politik; memicu semangat para peneliti politik dunia Islam agar mencari dimensi-dimensi komparatif interpretatif baru dalam hubungan antara negara dan Islam Politik di dunia Islam terutama negara-negara majemuk yang bermayoritas Muslim.

E. Kerangka Teori

1. Rezim

Rezim merupakan sistem politik pemerintahan yang tidak hanya mencakup mekanisme pemerintahan dan institusi-institusi negara tetapi juga struktur dan proses interaksinya dengan masyarakat luas terkait distribusi kekuasaan, kekayaan dan sumber-sumber. Oleh karena itu suatu rezim dapat disifati atau dikarakterisasi dengan pola pemerintahan atau pengaturan kehidupan ekonominya.

Ada dua bentuk rezim: rezim domestik dan rezim internasional. Rezim domestik merupakan norma sistem politik di mana pemerintahan yang berkuasa dapat mengontrol seluruh proses komunikasi politik agar seluruh peraturan, prosedur, dan prinsip pengambilan keputusan berjalan sesuai dengan kehendak pemerintahan. Rezim domestik dapat diidentifikasi dengan kepala pemerintahan yang berkuasa, contohnya rezim Soeharto, rezim Sadat, rezim Saddam, dan sebagainya. Sedangkan rezim internasional merupakan prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang mengarah bidang isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Istilah rezim – pada umumnya- digunakan untuk sebutan bagi pemerintahan yang bersifat otoriter, yakni di mana lembaga eksekutif negara dapat mengontrol lembaga legislatif dan

lembaga yudikatif terutama berkat loyalitas partai dominan dan militer. Pemusatan kekuasaan dalam lembaga eksekutif dapat disebabkan oleh situasi-situasi seperti: perang melawan negara lain; pemberontakan dalam negeri; depresi ekonomi; atau bencana alam.

Ketika kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam kancah politik nasional dikuasai oleh *Power* (kekuasaan)¹ rezim yang berkuasa, baik secara persuasif, negosiatoris, maupun koersif, maka rezim tersebut disebut rezim hegemonis hingga semua peraturan pengambilan keputusan akan didominasi oleh pihak rezim. Alasan realistik utama di balik hegemoni rezim adalah menjaga stabilitas dengan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan anarki. Peneliti menyebut stabilitas tersebut “stabilitas rezim hegemonis”.² Untuk tujuan stabilitas itu, rezim mengendalikan komunikasi politik (jaringan *input* dan *output* sistem politik). Rezim Soeharto dan Anwar Sadat mengendalikan komunikasi politik – secara umum- ala gelang karet, yakni diperketat pada masa ancaman krisis politik dan dilonggarkan bilamana krisis itu pulih dan kehidupan politik makin stabil dan tenang.

Setiap rezim yang memiliki otoritas atau legitimasi lazimnya mengusung suatu ideologi sebagai landasan sistem politik dan ekonomi. Ideologi yang diusung oleh rezim Soeharto adalah Demokrasi Pancasila dengan ekonomi pembangunan yang liberal; sedangkan ideologi yang diusung rezim Sadat adalah Nasionalisme Mesir (*Al-Wathaniyah Al-Mishriyah* الوطنية

المصرية) sebagai pengganti ideologi Pan-Arabisme (*Al-Qawmiyah Al-'Arabiyah* القومية العربية) yang diusung oleh presiden Gamal Abdel Nasser, dan sistem ekonomi yang diadopsi adalah sistem ekonomi liberal yang didasarkan pada kebijakan *infitah* (*open-door policy*). Untuk itu, kedua rezim selalu berupaya untuk mempromosikan budaya politik (*political culture*)³ dan juga opini publik (*public opinion*) yang mendukung ideologi politik dan ekonominya serta kebijakan-kebijakannya terhadap institusi Islam Politik.

2. Kebijakan

Dalam sistem politik, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin politik sesuai dengan tujuan-tujuan dan nilainya setelah mempertimbangkan beberapa alternatif rencana dan sarana-sarana politik dan non-politik dalam rangka menanggapi suatu masalah khusus berdasarkan penilaiannya terhadap tingkat kepentingan dan kelayakan. Kebijakan (*policy*) menurut James E. Anderson, adalah “alur tindakan yang purposif (berencana) yang diikuti oleh aktor satu atau banyak dalam menangani sebuah masalah atau hal yang penting”.⁴ Adapun menurut Heywood, kebijakan (*policy*) merupakan hubungan antara rencana atau niat (yakni apa yang pemerintah menyatakan akan dilakukannya), tindakan (yakni yang dilakukan oleh pemerintah) dan hasil (yakni dampak terhadap masyarakat luas).⁵

Kebijakan atau keputusan politik yang diambil oleh aktor politik dapat mencerminkan rasionalitas aktor, strategi jangka panjang atau pendeknya, latar belakang organisasi birokrasinya, dan

¹ Power adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengutamakan pilihannya atas pilihan-pilihan dari pihak lain. Susan Strange, *The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge University Press, 1996, p. 17

² Sebutan ini dianalogikan pada hegemonic stability theory dalam ilmu hubungan internasional yang menyatakan bahwa stabilitas sistem internasional serta peraturan hubungan politik dan ekonomi internasional dapat ditentukan oleh negara yang paling kuat. Lihat: Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse. *International Relations*, p. 48

³ Budaya politik adalah orientasi psikologis rakyat terhadap objek-objek politik seperti partai-partai, pemerintahan, dan konstitusi yang diungkapkan melalui sikap-sikap politik, keyakinan-keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai mereka. Heywood, *Politics*, p. 219

⁴ James E. Anderson. *Public Policy Making* (New York: Praeger Publishers, 1976), p. 3

⁵ Heywood. *Politics*, p. 400

karakternya.⁶ Rasionalitas kebijakan-kebijakan Rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik tampak dalam tujuannya masing-masing untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya krisis legitimasi kekuasaan akibat kondisi dalam negeri. Latar belakang militer masing-masing tampak dalam upayanya yang berhasil melemahkan oposisi. Urutan dan taktik penerapan kebijakan rezim Soeharto yang mana kebijakan subjugasi mendahului kebijakan akomodasi mencerminkan pengalaman militer panjang Soeharto yang membuatnya selalu berhadapan dengan gerakan-gerakan pemberontakan seperti DI/TII; sedangkan kebijakan Sadat yang mulai dengan akomodasi baru subjugasi mencerminkan hubungan baiknya dulu dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin* sebelum revolusi 1952 dan juga latar belakang karirnya sebagai politisi dan penulis.

Ada dua strategi utama yang diambil oleh rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik, yaitu strategi subjugasi dan strategi akomodasi. Subjugasi merupakan salah satu bentuk strategi pertikaian dalam konflik kepentingan yang digunakan sebagai solusi kompetitif-distributif (*competitive-distributive strategy*). Tujuan dari strategi konfrontasional ini adalah melemahkan, mengalahkan, dan memaksimalkan keuntungan dari pihak lawan atau pesaing. Strategi ini termasuk *zero-sum game* yang hasilnya bersifat *win-lose* bukan *win-win*.⁷ Kekerasan adalah salah satu wujud dari konfrontasi subjugatoris terhadap oposisi politik dengan cara intimidasi, koersi, represi (kekerasan

proaktif), dan supresi (kekerasan reaktif), penekanan, penindasan, pengawasan yang ketat. Rezim represif mempertahankan kekuasaannya dengan menjauhkan massa dari perpolitikan dan tidak memberikan mereka kebebasan berekspresi, baik dengan cara politis seperti pelemahan atau pembubaran sarana perwakilan politik (seperti partai, pemilu, serikat buruh, pers yang bebas, dll.) atau dengan cara psikologis (seperti penebaran rasa takut).⁸

Sebaliknya, akomodasi merupakan strategi penanganan konflik kepentingan bersifat kolaboratif-integratif di mana pihak-pihak yang terlibat memilih untuk bekerjasama sebagai opsi kompromi resiprokal yang memuaskan keinginan dan cita-cita masing-masing pihak sebagai solusi *win-win*. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghindari konfrontasi yang tidak menguntungkan masing-masing pihak.⁹ Rasionalitas kebijakan-kebijakan Rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik tampak dalam tujuannya masing-masing untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya krisis legitimasi kekuasaan akibat kondisi dalam negeri. Latar belakang militer masing-masing tampak dalam upayanya yang berhasil melemahkan oposisi.

⁶ Heywood. Politics, pp. 400-403; cf. Hagopian. Regimes..., pp. 112-114; Ho-Won Jeong, Understanding Conflict and Conflict Analysis. (London: SAGE, 2008), p. 27; lihat juga: Amitai Etzioni. Mixed Scanning: A Third Approach to Decision-Making. Public Administration Review. Vol. 27, pp. 385-389; dan Amitai Etzioni, The Active Society, (New York: Free Press, 1968), p. 289

⁷ Ibid, p.31-33

⁸ Heywood, Politics, p. 387

⁹ Ho-Won Jeong, Understanding Conflict, p.33

Tabel No.1

Persamaan & Perbedaan Kebijakan Rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap Politik Islam¹

Kebijakan	Rezim Soeharto	Rezim Sadat	Keterangan
A. Strategi Subjugasi			
1. Modus Kekerasan dan Peminggiran	<p>a. Penolakan rehabilitasi Masyumi 1967 dan proposal pendirian PDII yang diajukan M. Hatta (1967).</p> <p>b. Campur tangan penentuan Djarnawi Hadikusumo sebagai ketum pertama Parmusi (1968), dan penentuan para ketum PPP (1973-1998).</p> <p>c. Penolakan masuknya Piagam Jakarta dalam pembukaan UUD 1945 pada tahun 1968.</p> <p>d. memperkuat dwifungsi ABRI untuk mendukung Golkar (1969)</p> <p>e. Kecurangan dalam</p>	<p>a. IM dilarang untuk mendirikan partai politik berbasis Islam.</p> <p>b. Kecurangan dalam memenangkan pemilu dengan manipulasi dan intimidasi (1979).</p> <p>c. Supresi terhadap kelompok Islam Politik setelah peristiwa konflik, terorisme atau demonstrasi besar, seperti Peristiwa Al-Khankah (1972), demonstrasi mahasiswa (1972), Demonstrasi Roti (1977), dan Peristiwa Az-Zawyah Al-Hamra 1981.</p> <p>d. Aparat keamanan dan intelejen diintensifkan untuk pengawasan yang ketat dan tindakan represif terhadap aktivis Islam Politik,</p>	<p>a. Persamaan</p> <p>1. Tingkat persamaan signifikan</p> <p>2. Kedua rezim tidak menggunakan modus kekerasan pada masa peralihan dari sistem rezim yang sebelumnya tetapi setelah masa konsolidasi.</p> <p>3. Kebijakan kekerasan dijustifikasi dengan alasan menjaga stabilitas, pembangunan, perdamaian dan kesa-tuan negara, terutama setelah terjadinya peristiwa konflik, terorisme atau demonstrasi besar.</p> <p>4. Kebijakan kekerasan dan pemburukcitraan</p>

¹ Diolah dari berbagai sumber

Setelah pemerintahan Soeharto dan pemerintahan Sadat berhasil mencapai konsolidasi kekuatan sistem politik, keduanya berkembang sehingga menjadi otoriter dan hegemonis demi menjamin stabilitas politik, menghindari potensi terjadinya krisis dengan melegitimasi kekuasaan, dan mensubordinasikan kekuatan-kekuatan politik saingannya termasuk institusi Islam Politik. Oleh karena itu, Peneliti merumuskan pola kebijakan-kebijakan itu sebagai hegemonic regime's domestic political stability strategy (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis). Stabilitas politik dianggap sebagai landasan utama bagi pembangunan ekonomi, kemajuan dalam segala bidang, dan kedamaian serta keamanan dalam negeri.

	<p>memenangkan pemilu dengan manipulasi dan intimidasi dan penangkapan kyai-kyai NU (1971 dan 1977) serta kebijakan monoloyalitas PNS kepada Golkar, (1970).</p> <p>f. Birokrasi dikuasai oleh militer dan sedikitnya aktivis Islam dalam keempat kabinet pertama.</p> <p>g. Supresi terhadap aktivisme Islam pasca terjadinya peristiwa konflik, terorisme, atau demonstrasi besar, seperti peristiwa MALARI (1974), Peristiwa Lapangan Banteng (1982), Peristiwa Tanjung Priok (1984), peristiwa Lampung (1989), dll.</p> <p>h. Fusi Partai (1975) dan Asas Tunggal (1985); dan membatasi kepengurusan Parpol sampai tingkat Dati II, dan mencabut sifat oposisi dari Parpol (1975).</p> <p>i. NKK/BKK (1978/1979) dan Penetapan P4 (1978), Pelarangan</p>	<p>terutama pasca Demonstrasi Roti (1977).</p> <p>e. Banyak masjid-masjid yang dinegerikan, dan urusan agama dijadikan hak prerogatif Kementerian Wakaf dan Al-Azhar. Imam-imam masjid yang rajin mengkritik kebijakan rezim, dipindahkan, dipecat, ataupun dipenjara.</p> <p>f. Minimnya jumlah elemen Islam Politik dalam parlemen, kabinet, dan jabatan-jabatan tinggi dalam birokrasi dan militer.</p> <p>g. Pencabutan izin terbit pers kelompok Politik Islam (IM) yang berani mengkritik kebijakan rezim (terutama mulai 1980).</p> <p>h. Penangkapan banyak tokoh-tokoh dan aktivis Islam Politik (termasuk IM) (1981).</p>	<p>ditujukan secara khusus kepada aktivis Islam Politik Legal-Formalistik/ garis keras, dan kebijakan ini berhasil memenangkan partai yang berkuasa lawan kelompok Islam Politik.</p> <p>b. Perbedaan</p> <p>1. Sadat mengintensifkan kebijakan subjugasi pada akhir masa rezimnya, sedangkan Soeharto sebaliknya.</p>
--	--	---	---

	<p>jilbab bagi siswi Islam di tingkat pendidikan menengah, dan membatasi aktivitas masjid kampus, (1982).</p> <p>j. Aparat keamanan dan intelejen diintensifkan untuk pengawasan yang ketat dan tindakan represif terhadap aktivis Islam Politik legal-formalistik, mulai awal rezim; memperketat pengawasan dan perizinan terhadap seminar-seminar politik Islam. (1970-an dan 1980-an)</p>		
<p>2. Modus Propaganda dan Politik Citra</p>	<p>a. Rezim berupaya untuk menanamkan budaya politik yang memandang bahwa negara akan dalam bahaya jika kelompok Islam Politik atau Komunis mengambil kekuasaan. (1960-an–1990-an).</p> <p>b. Rezim berupaya menyaingi dan membayangi kinerja sosial-keagamaan dari kelompok Islam Politik dengan mendirikan lembaga-lembaga serupa di bawah naungan pemerintahan,</p>	<p>a. Rezim berupaya untuk menanamkan budaya politik yang memandang bahwa negara akan dalam bahaya jika kelompok Islam Politik atau Komunis mengambil kekuasaan (1970-an).</p> <p>b. Rezim mempromosikan lembaga agama negeri Al-Azhar sebagai otoritas utama dalam hal keagamaan.</p> <p>c. Media rezim Sadat menyorot simbol-simbol dan retorika keislaman Sadat seperti shalat Jumat, pakaian gamis, tasbih, kutipan dari Al-Qur'an, dll. (1970-an)</p>	<p>a. Persamaan</p> <p>1. Tingkat persamaan signifikan</p> <p>2. kedua rezim berupaya agar ciri-ciri keislaman tidak menjadi identik dengan kelompok Islam Politik.</p> <p>b. Perbedaan</p> <p>1. Propaganda rezim Sadat anti-Islam Politik digencarkan setelah kekuatan Islam Politik mulai menantang kekuasaannya,</p>

	<p>seperti YAMP, GUPPI, Dharma Wanita, dll., tahun (1970-an-1990-an)</p> <p>b. Media rezim menyorot simbol-simbol dan retorika keislaman Presiden Soeharto seperti ibadah haji (1991) dan juga dukungannya kepada beberapa kegiatan dakwah.</p> <p>c. Indonesia berperan aktif dalam OKI (1990-an)</p> <p>d. Pendirian MUI (1975)</p> <p>e. Tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.</p>	<p>d. Penyusunan kabinet dengan cara yang menunjukkan citra keislaman Mesir (1970-an)</p> <p>e. Mengambil tindakan represif terhadap Paus Shenouda karena dianggap provokator anti-kerukunan umat beragama (1981)</p> <p>f. Menggalang dukungan agar keanggotaan Mesir dalam OKI dicairkan kembali (1979)</p>	<p>sedangkan propaganda rezim Soeharto hanya mengantisipasi kekuatan Islam Politik.</p> <p>2. Sadat lebih banyak menonjolkan simbol-simbol keislaman daripada Soeharto dalam menjalankan politik citra tetapi kurang efektif akibat kondisi ekonomi dan perjanjian damai dengan Israel yang dipaksakan oleh kondisi Mesir pada saat itu.</p>
B. Strategi Akomodasi			
1. Aspek Sosial-Keagamaan	<p>a. Bertambahnya jumlah aktivis Islam dalam jabatan birokrasi sejak pertengahan (1980-an)</p> <p>b. Memberi amnesti kepada tahanan-tahanan dari tokoh-tokoh dan aktivis Islam Politik (1966-1990-an)</p> <p>c. Mencabut larangan berjilbab bagi siswi-siswi</p>	<p>a. Pembebasan para tahanan Islam Politik dari IM dan kelompok radikal (1972)</p> <p>b. anggota IM diberikan kebebasan dan dukungan untuk menguasai pelbagai organisasi masyarakat sipil seperti persatuan mahasiswa kampus, serikat buruh, dll. (1972-1977)</p> <p>c. pemberian izin terbit kembali untuk</p>	<p>a. Persamaan</p> <p>1. Tingkat persamaan signifikan</p> <p>2. Digunakan sebagai strategi untuk mengatasi krisis kekurangan dukungan elite politik partai yang berkuasa. Akomodasi itu diawasi juga oleh negara.</p>

	<p>Islam dalam lembaga pendidikan menengah pada jam sekolah (1982)</p> <p>d. Pendirian ICMI (1980)</p> <p>e. Peresmian Bank Muamalat Indonesia (1991)</p> <p>f. Penghapusan SDSB (1993)</p> <p>g. Keputusan koordinasi Bazis (1991)</p> <p>h. Penyelenggaraan Festival Budaya Islam Istiqlal (1991 dan 1995)</p> <p>i. Berdirinya DDII (1967) dan LIPPM, (1986).</p>	<p>media pers IM seperti Majalah Ad-Dakwah (1975).</p> <p>d. Peresmian <i>Faisal Islamic Bank of Egypt</i> (1978) dan <i>Islamic International Bank for Investment and Development</i> (1980).</p>	<p>b.Perbedaan</p> <p>1. Kelompok Islam Politik Radikal diberikan kebebasan oleh rezim Sadat sedangkan rezim Soeharto memberikan kebebasan hanya kepada kelompok Islam Politik Kultural-Substansialistik.</p>
<p>2. Aspek Politik Hukum</p>	<p>a. Disahkannya beberapa produk hukum khusus umat Islam seperti UUPN (1988), UUPA (1989), KHI (1991).</p> <p>b. kompromi dengan kelompok Politik Islam dalam mengesahkan UU Perkawinan no. 1/1974.</p>	<p>a. Penetapan Syariat Islam sebagai sumber utama legislasi Mesir (1980).</p> <p>b. Pembentukan komisi-komisi dalam parlemen untuk kodifikasi Syariah (1980-1981).</p> <p>c. Disahkannya beberapa produk hukum yang melarang pelanggaran terhadap Syariah Islam, ateisme, pelecehan agama dan libertinisme seperti UU Partai Politik no. 40/1977 (pasal 4), dan</p>	<p>a. Persamaan</p> <p>1. Inkorporasi Syari'at Islam dalam perundang-undangan nasional Mesir dan Indonesia tidak sampai menghasilkan penerapan syariah Islam secara utuh karena hal tersebut bertentangan dengan dasar kemajemukan negara.</p> <p>b. Perbedaan</p> <p>1. Akomodasi politik</p>

		UU Anti-Pelecehan Nilai-Nilai Luhur (pasal 3) (1980).	hukum Sadat menyebabkan kekha-watiran kelompok agama minoritas (Kristiani) karena menyangkut UUD sedangkan akomodasi rezim Soeharto tidak memunculkan kekhawatiran itu.
--	--	---	---

3. Islam Politik

Politik Islam dapat didefinisikan sebagai teori politik dalam pandangan Islam, yaitu simbol-simbol dan nash-nash dari agama Islam yang berkisar pada ketertiban sosial, kekuasaan dan autoritas. Dengan kata lain, Politik Islam merupakan bentuk politik identitas yang memandang Islam sebagai *din* dan *daulah* (agama dan negara). Sedangkan Islam Politik adalah institusi politik yang orientasinya adalah mengusung Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan sistem politik negara dan berjuang untuk menerapkan syariat Islam dalam negara-negara bermayoritas Muslim atau mewujudkan sebuah negara Islam secara legal-formal maupun secara substansial berdasarkan interpretasi terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan sejarah Khilafah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Berdasarkan itu, label Islam Politik mencakup semua kekuatan-kekuatan politik yang memiliki orientasi dan upaya agar agama Islam tidak dipisahkan dari sistem politik negara dan kehidupan masyarakat, bahkan tidak dipisahkan dari sistem politik di seluruh dunia Islam (negara-negara bermayoritas Muslim).¹

Revivalisme Islam modern tidak hanya ditandai dengan aktivisme Islam Politik tetapi juga kegiatan-kegiatan

sosialisasi norma-norma Islam dalam semua pranata sosial negara.² Corak Islam itu disebut Islam kultural, Islam sipil atau Islam substantivistik dan dikontraskan dengan Islam politik yang bersifat legal-formalistik atau fundamentalis atau radikal (garis keras) baik yang bergerak secara struktural dalam sistem politik sebagai partai politik maupun yang berjuang di luar sistem politik.³

Persamaan dan perbedaan antara institusi Islam Politik di Indonesia pada era Soeharto dan di Mesir pada era Sadat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

² Aktivisme Islam dapat dipicu oleh beberapa alasan: 1. sebagai simbol oposisi atau protes terhadap kegagalan pemerintah dalam menenuhi harapannya atau 2. Sebagai reaksi terhadap terjadinya krisis identitas. R. Hrair Dekmejian, "Islamic Revival: Catalysts, Categories and Consequences" in Shireen T. Hunter (ed.). *The Politics of Islamic Revivalism*. Bloomington: Indiana University Press, 1988, hlm. 7; Saad Eddin Ibrahim, "Egypt's Islamic Activism in 1980's" in *Third World Quarterly*, vo. 10, no. 2, (April 1988), p. 632

³ Sistem politik adalah seperangkat proses dan institusi yang mengatur konflik yang potensial meletus akibat persaingan untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kekurangan-kekurangan manusia. Hagopian, *Regimes*, p. 8

¹ Youssef Choueir, "Islam and Fundamentalism" dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright (eds.) *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, versi Indonesia (Jakarta: MediaTOR, 2003), hlm. 297.

Tabel No. 2
Perbandingan Institusi Islam Politik
Indonesia dan Mesir

Indonesia	Mesir
<p>a. Kategori Pertama: organisasi formal sebagai partai politik atau sayap politik suatu organisasi masyarakat (seperti: NU, Parmusi, PSII, Perti (yang kemudian digabungkan dalam PPP). Kategori ini tidak memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam substantivistik dan memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p> <p>b. Kategori Kedua: organisasi tidak formal dan terlarang ataupun ditolerir (seperti: HTI dan DI/NU). Kategori ini memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam legal-formalistik tanpa memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p>	<p>a. Kategori Pertama: organisasi tidak formal yang memiliki sayap politik yang ditolerir oleh negara meskipun tidak diakui secara resmi (yakni: <i>Ikhwanul Muslimin</i>). Kategori ini tidak memandang demokrasi bertentangan dengan Islam dan memperjuangkan Islam substantivistik dan memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.</p> <p>b. Kategori Kedua: organisasi terlarang dan tidak ditolerir karena dianggap gerakan garis keras (seperti: <i>Al-Jama'ah Al-Islamiyah</i>, <i>Jamaah at-Takfir wal Hijrah</i> dan <i>Jama'ah Al-Jihad</i>). Kategori ini memandang demokrasi bertentangan</p>

	dengan Islam dan memperjuangkan Islam legal-formalistik tanpa memiliki dukungan signifikan dari segmen masyarakat Islam.
--	--

F. Hipotesis

Berdasarkan analisis teoretis di atas yang diproyeksikan kepada data-data yang terkumpulkan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa:

1. Kebijakan-kebijakan rezim Soeharto dan rezim Anwar Sadat terhadap institusi Islam Politik memiliki tingkat persamaan yang cukup signifikan dalam strategi (subjugasi dan akomodasi) dan tujuan (mengalahkan semua kekuatan institusi Islam Politik) tetapi beda dalam urutan dan taktik implementasi.

2. Faktor utama di balik kebijakan-kebijakan tersebut adalah kondisi dalam negeri yang memerlukan stabilitas politik agar terhindar dari terjadinya krisis legitimasi kekuasaan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu metode ilmu perbandingan politik (*comparative politics*) yaitu studi kasus representatif dengan data kualitatif yang didukung juga oleh data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif analitis. Sebagai kajian kepustakaan, data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yakni dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen sejarah, jurnal, surat kabar dan juga website-website internet, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis lalu diambil kesimpulannya secara induktif berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini. Metode komparatif ini digunakan untuk menemukan variabel-variabel yang dianggap dapat menafsirkan persamaan dan perbedaan dalam

kebijakan-kebijakan antara rezim presiden Soeharto dan rezim presiden Sadat terhadap institusi Islam Politik sebagai kasus representatif dari kebijakan rezim otoriter terhadap institusi Islam Politik di negara pluralis yang mayoritasnya beragama Islam. Diharapkan bahwa studi kasus ini dapat memberi kontribusi untuk pengembangan kerangka teori atau kajian yang lebih luas yang menyangkut tema penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas dinamika sejarah Islam Politik di Indonesia dan Mesir hingga akhir Rezim Soeharto dan Rezim Sadat. Sejarah Islam Politik di Indonesia dipaparkan mulai masa sebelum era Orde Baru hingga akhir era Orde Baru, sedangkan di Mesir mulai masa sebelum era Sadat hingga akhir era Sadat.

Bab III membahas strategi rezim Soeharto dan rezim Sadat dalam menghadapi Islam Politik dan mencakup: konteks rasionalitas kebijakan kedua rezim dan strategi kebijakan kedua rezim terhadap Islam Politik: strategi subjugasi kekuatan Islam Politik dan strategi akomodasi.

Bab IV membahas analisis persamaan dan perbedaan penerapan kebijakan rezim Soeharto dan rezim Sadat terhadap Islam Politik dan mencakup: perbandingan persamaan dan perbedaan; interpretasi rasio persamaan dan perbedaan; dan signifikansi hasil analisis berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori.

Bab V merupakan penutup dan mencakup kesimpulan dari semua bab-bab yang sebelumnya.

I. Kesimpulan

1. Kebijakan politik kedua rezim diklasifikasikan ke dalam dua strategi besar, yaitu: strategi subjugasi kekuatan Islam Politik dan strategi akomodasi. Strategi pertama mencakup: a. modus kekerasan dan peminggiran; dan b. modus propaganda dan politik citra. Strategi kedua mencakup dua aspek, yakni: aspek sosial-keagamaan, dan aspek politik hukum. Strategi subjugasi diterapkan setelah tercapainya konsolidasi kekuatan rezim, sedangkan strategi akomodasi diterapkan pada saat rezim berupaya untuk menghindari potensi terjadinya krisis legitimasi kekuasaan.
2. Kebijakan-kebijakan itu memiliki persamaan yang signifikan dan komparabel dalam pola dan tujuan tetapi berbeda dalam urutan dan taktik penerapan sehingga dapat dikatakan bahwa formal-tidaknya institusi Islam Politik tidak memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan rezim yang berkuasa terhadap institusi Islam Politik dalam rangka persaingan politik. Soeharto mengintensifkan kebijakan akomodasi menjelang akhir rezimnya sementara Sadat mengintensifkan kebijakan akomodasi pada awal pemerintahannya. Di sisi lain, Sadat mengintensifkan kebijakan intervensi dan kekerasan menjelang akhir rezimnya, sedangkan Soeharto mengintensifkan kebijakan intervensi dan kekerasan jauh sebelum menjelang akhir rezimnya, yaitu langsung setelah masa konsolidasi rezimnya.
3. Kebijakan kedua rezim hegemonis itu terhadap Islam Politik adalah sama-sama pragmatis realistik untuk memaksimalkan kekuatan dan keuntungan rezim dan mengalahkan semua kekuatan institusi Islam

- Politik dengan tujuan memujudkan stabilitas politik dan menghindari terjadinya krisis legitimasi akibat kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, Peneliti merumuskan pola kebijakan-kebijakan itu sebagai *hegemonic regime's domestic political stability strategy* (strategi stabilitas politik dalam negeri rezim hegemonis). Dukungan Militer dan sistem partai dominan adalah dua hal yang menopang sikap hegemonis rezim terhadap Islam Politik. Kedua rezim tidak mengaplikasikan sistem demokrasi liberal secara ideal sehingga akhirnya demokrasi berubah menjadi otoritarianisme. Persamaan dan perbedaan yang ada antara kebijakan masing-masing rezim terhadap Islam Politik mencerminkan persamaan dan perbedaan dalam kondisi dalam negeri di negara masing-masing.
4. Kebijakan-kebijakan kedua rezim terhadap institusi Islam Politik bukan kebijakan terhadap agama Islam itu sendiri, mengingat bahwa kedua presiden itu beragama Islam dan mayoritas penduduk negaranya beragama Islam. Terpinggirnya institusi Islam Politik tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan rezim yang berkuasa; yaitu institusi kekuatan Islam Politik bukan hanya objek dalam hal ini tetapi juga subjek. Terjadinya perselisihan pendapat bahkan konflik dan perpecahan internal dalam institusi Islam Politik mengurangi basis dukungan dari masyarakat Islam.
 5. Kebijakan yang terkait dengan kekerasan, intervensi atau peminggiran dilegitimasi dengan memanfaatkan peristiwa-peristiwa tertentu sebagai landasan yang sah. Masing-masing rezim mengintensifkan kebijakan intervensi dan kekerasan pada masa puncak konsolidasi rezimnya.
- Namun pada masa adanya potensi krisis legitimasi kekuasaan dan stabilitas sistem politik, rezim lebih memilih kebijakan akomodasi terhadap Islam Politik. Ada kemungkinan bahwa hubungan erat antara kedua negara mencakup pertukaran pengalaman dan kebijakan dalam hal menghadapi institusi Islam Politik.
6. Kebijakan akomodasi rezim Anwar Sadat terhadap Islam Politik memberikan ruang kebebasan yang luas bagi kelompok Islam garis keras sedangkan rezim Soeharto hanya mengakomodir aktivisme Islam moderat yang bersifat substantivistik bukan legal-formalistik.
 7. Reaksi Islam Politik di Indonesia menjelang akhir rezim Soeharto berbentuk transformasi dari corak legal-formalistik menjadi substantivistik, tetapi reaksi Islam Politik di Mesir menjelang akhir rezim Anwar Sadat memiliki spektrum yang bervariasi mulai dari gerakan garis keras hingga gerakan moderat.
 8. *Ikhwanul Muslimin* arus utama (*main stream Muslim Brotherhood*) dan PPP dianggap mencerminkan Islam Politik yang moderat dan dapat menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi yang ada.

Tingkat Orisinalitas Penelitian.

Meskipun terdapat banyak karya yang menganalisis masing-masing dari sistem pemerintahan rezim Soeharto dan rezim Anwar Sadat serta hubungan masing-masing dengan institusi Islam Politik, tetapi kajian dalam disertasi ini tetap orisinal karena beberapa pertimbangan, yaitu, 1) Belum adanya kajian politik komparatif serupa tentang kebijakan rezim Soeharto dan Anwar Sadat terhadap Islam Politik; 2) Isi disertasi memberi kontribusi ilmiah baru berupa klasifikasi serta diskripsi baru terhadap

kebijakan kedua rezim, penentuan beberapa faktor yang melatarbelakangi kesamaan kebijakan kedua rezim terhadap Islam Politik, dan pengembangan tabel-tabel dan grafik-grafik yang menjelaskan alur kebijakan kedua rezim terhadap Islam Politik serta ; 3) Kritik peneliti terhadap overgeneralisasi hasil beberapa kajian ilmiah yang sudah cukup populer dan mapan terutama dalam hal pembagian fase-fase hubungan negara dan masyarakat Islam di mana kebijakan rezim digambarkan seolah-olah terhadap agama Islam itu sendiri (teori Abangan-Sekuler-Nasionalis versus Santri-Agamis-Islamis) dan bahkan peneliti menyatakan bahwa fase-fase itu hanya merupakan urutan intensifikasi strategi kebijakan tertentu-tentu tanpa lenyapnya strategi kebijakan yang lain sama sekali.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abegebriel, A. M, dkk (ed.). *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SR-INS Publishing, 2004.
- Al-Anani, Khalil. *Al-Ikhwan Al-Muslimun fi Misr: Shaikhukhah Tusari' Az-Zaman?*. Cairo: Maktabah El-Shorouk International, 2007.
- Al-Banna, Hassan. *Mudzakkirat al-Da'wah wa al-Da'iyah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1974.
- , *Majmuat Rasail al-Imam asy-Syahid. (Risalah Mukhtamar V)*. Alexandria: Dar al-Da'wah, 1988.
- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Praeger Publishers, 1976.
- Andrain, Charles F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terj. Luqman Hakim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.
- Ayalon, 'Ami (ed.). *An-Nizham Al-Hakim wal Mu'aradhah Fi Mishr fi 'Ahd Al-Sadat*. Terj. Arab dari versi Ibrani "Mishtar ve Opozitsyah be-Mitsrayim bi-tekufat Sadat"[Eng: *Regime and Opposition in Egypt during Sadat's Era*]. Cairo: State Information Service, t.t.
- Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam*. Michigan: University of Michigan Press, 2008.
- Ayubi, Nazih. *Political Islam: Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London and New York: Routledge, 1991.
- Bandoro, Bantarto (ed.). *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Cet.I. Jakarta: CSIS , 2005.
- Basyir, A.A. *Hubungan Agama dan Pancasila*. Yogyakarta: UII Press, 1985.
- Bayumi, Zakaria Sulaiman. *Al-Ikhwaniyyah fil Hayatis Siyasiyyatil Mishriyyah 1928-1948*. Cairo: Matkabah Wahbah, 1979
- Benin, J and Stork, J. *Political Islam: Essays from Middle East Report*. NY: I.B. Tauris Publisher, 1997.
- Bresnan, John. *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Case, William. *Politics in Southeast Asia: Democracy Or Less*. London: Routledge Curzon, 2002.

- Christie, Clive J. *Southeast Asia in the Twentieth Century*. New York: I.B. Tauris Publishers, 1998.
- Church, Peter (ed.). *Focus on Southeast Asia*. Hong Kong: Asean Focus Group, 1995.
- Crouch, H. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1988.
- Darul Aqsa et al. *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*. Jakarta: INIS, 1995.
- Edwards, Beverly Milton. *Islam and Politics in the Contemporary World*. UK: Polity Press Ltd., 2004.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Terj. Ihsan Ali Fauzi. Cet.1. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998.
- Elson, Robert E. *Suharto: A Political Biography*. UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge. 2001.
- Esposito, John L. and John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. (terj. Rahmani Astuti). Cet.1. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Etzioni, Amitai. *The Active Society*. New York: Free Press, 1968.
- Fachir, A.M. *Potret Hubungan Indonesia-Mesir*. Cet.1. Cairo: KBRI, 2009.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Terj. Farid Wajidi dan Muni Adelina Bachtiar. Cet.1. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Feillard, Andree. *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Fluehr-looban, Carolyn (ed.). *Against Islamic Extremism*. University Press of Florida, 1998.
- Fuller, Graham. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave, 2003.
- Funston, John. *Government and Politics in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, 2011.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Cet.3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Goldschmidt, Arthur Jr. *A Concise History of the Middle East*. 7th ed. Colorado: Westview Press, 2002.
- Goodin, Robert E. and Hans Dieter Klingemann. *A New Handbook of Political Science*. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Hagopian, Mark N. *Regimes, Movements and Ideologies*. New York: Longman, 1978.
- Hague, Rod, Martin Harrop & Shaun Breslin. *Comparative Politics and Government: An Introduction*. 4th ed. London: MacMillan, 1998.
- Haikal, Muhammad Hasanain. *Kharif Al-Ghadhab (Autumn of Fury)*. Cairo: Silsilah Judran Al-Ma'rifah, 2006.
- Haris, Syamsuddin. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.
- Hefner, R.W. *Civil Islam-Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Heywood, Andrew. *Politics*. 2nd ed. New York: Palgrave, 2002.
- Hilmy, Masdar. *Islamism and Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Islam, Syed Sirajul. *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson, 2005.
- Jamhari dan Jajang Jahroni (eds.). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Jeong, Ho-Won. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: SAGE, , 2008.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiah*. Cet.1. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Universitas YARSI, 1999.
- Kaelani. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, t.t.
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: CV. Rajawali, , 1983.
- , *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- , *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Kipp, R.S. and Susan Rodgers (ed.). *Indonesian Religion in Transition*. Tucson: The University of Arizona, 1987.
- Kuhonta, Erik Martinez et al (ed.). *Southeast Asia in Political Science: Theory, Region, and Quantative Analysis*. California: Stanford University Press, , 2008
- Kumar, Sree and Sharon Siddique. *Southeast Asia: The Diversity Dilemma*. Singapore: Select Publishing, 2008.
- Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985.
- Lahoud, Nelly & Anthony H. John (eds.) *"Islam in World Politics"*. London: Routledge, 2005
- Liddle, R. William. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Lipset, Seymour Martin (ed.). *The Encyclopedia of Democracy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc., 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu: Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Macridis, Roy C. and Bernard E. Brown (eds.). *Comparative Politics: Notes and Readings*. 5th ed., Homewood, Il.: The Dorsey Press, 1997
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mandaville, Peter. *Global Political Islam*. London & New York: Routledge, 2007.
- Mashad, Dhurorudin (ed.). *Peluang Kerjasama Politik dan Ekonomi Indonesia-Timur Tengah*. Jakarta: PPW-LIPI, 1999.
- May, B. *The Indonesian Tragedy*. London: Routledge and Kegan Paul, 1978.
- Mitchel, Richard P. *The Society of Muslim Brothers*. London: Oxford University Press, 1969. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abdussalam Ridhwan." *Al-Ikhwaniyyah Muslimun*". Cairo: Maktabah Madbuli, 1977.
- Mortimer, Edward. *Faith and Power: The Politics of Islam*. New York: Random House, 1982.
- Moussalli, Ahmed S. "Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb". Beirut: American University of Beirut, 1992.
- Muttaqien, Dadan dkk (ed.). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Edisi II. Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Nathan, K.S. & Mohammad Hashim Kamali. *Islam in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, 2005
- Natsir, M. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Noer, Deliar. *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Nugroho, E. (ed.). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Delta Pamingkas, 1997.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Peretz, Don. *The Middle East Today*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Piscatori, James P. *Islam in a World of Nation-States*. Ed.I. Cambridge: The Royal Institute of International Affairs- Cambridge University Press, 1986.
- Platzdasch, Bernhard. *Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy*. Singapore: ISEAS, 2009.
- Pusponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Departmen Pendidikan Nasional. Ed.4. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Radi, Umaidi. *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*. Cet.1. Jakarta: Integritas Press, 1984.
- Ramage, Douglas E. *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*. Terj. Hartono Hadikusomo. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Romli, Lili. *Islam Yes, Partai Islam Yes. Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Roy, Oliver. *The Failure of Political Islam*. (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: "Gagalnya Islam Politik", oleh Harimurti dan Qamaruddin SF). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996.
- Rubin, Barry. *Islamic Fundamentalism in Egyptian Politics*. London: MacMillan, 1990.
- Said, Abdul-Aziz et al. *Contemporary Islam, Dynamic not Static*. UK: Routledge, 2006.
- Saidi, Anas (ed.). *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. Cet.1. Jakarta: Desantara, 2004.
- Salim, Arskal & Azyumardi Azra. *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Salim, Muhammad Said dan Ibrahim Arafat. *Al-'Alaqaq Al-Mishriyyah-Al-Asiawiyyah*. Cairo: Center for Asian Studies, 2000.
- Samuq, Ahmad Muhammad. *Kaifa Yufakkirul Ikhwanul Muslimun*. Beirut: Dar al-Jil, 1981.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analisis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Schwartz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. NSW: Allen & Unwin, 1994.
- Sihbudi, Riza. *Indonesia-Timur Tengah: Masalah dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sharabi, H.B. *Government and Politics of the Middle East in the Twentieth Century*. Princeton, N.J.: D. van Nostrand, 1963.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Cet. VI. Jakarta: Grasindo, 2007.

- Suryadinata, Leo. *Indonesia's Foreign Policy under Soeharto: Aspiring to International Leadership*. Singapore: Times Academic Press, 1996.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Politik Indonesia*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak (ed.). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi revisi II. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Truman, David B. *The Governmental Process*. New York: Alfred A. Knopf, 1958.
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Cet.5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wallace, William. *Foreign Policy and the Political Process: Studies in Comparative Politics*. New York: MacMillan, 1971.
- Wilhelm, D. *Emerging Indonesia*. London: Cassell, 1980.
- Yakan, Fathi. *Manhajiyatul Imam al-Syahid Hasan al-Banna wa Madaris al-Ikhwaniil Muslimin*. Beirut: Ar-Risalah, 1998.
- Zaki, Muhammad Syawqi. *Al-Ikhwaniil Muslimun wal Mujtama' Al-Mishri*. Cairo: Dar Al-Anshar, 1980.

2. Jurnal, Majalah dan Surat Kabar

Middle East Policy (Jurnal)

Third World Quarterly (Jurnal)

The Journal of Social, Political and Economic Studies

3. Situs Internet

<http://www.anwarsadat.org>

<http://www.ikhwanweb.com>

www.ppp.or.id

<http://news.bbc.co.uk>

<http://www.sis.gov.eg>

<http://www.ikhwanwiki.com>

<http://www.globalsecurity.org>

<http://www.politik.lipi.go.id>